

KATA PENGANTAR

Laporan Tata Kelola PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI ini disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang merujuk Surat Edaran OJK Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola yang baik di PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI menerapkan prinsip-prinsip TARIF sebagaimana telah kami ungkapkan pada laporan tahun-tahun sebelumnya.

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola ini meliputi:

1. Pengungkapan penerapan Tata Kelola.
2. Kepemilikan saham Direksi.
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham.
4. Kepemilikan saham Dewan Pengawas.
5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
6. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
7. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
8. Frekuensi rapat Dewan Pengawas.
9. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud).
10. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaiannya.
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
12. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.

Penjabaran dari penerapan tata kelola perusahaan sebagaimana tersaji dalam Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola berikut ini.

**LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK WONOGIRI
TAHUN 2018**

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUCIPTO, SE	DIREKTUR UTAMA
2	SARTI, SE.MM	DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN
3	SUWARTO, SE	DIREKTUR PEMASARAN

- **Sucipto, SE** sebagai Direktur Utama, diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 06 Agustus 2018. Telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1446/XI/SU/2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-869/KO.031/2018 Tanggal 13 November 2018 untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.
- **Sarti, SE.MM** diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan berdasarkan RUPS-LB tanggal 20 September 2017 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1347/X/SU/2017 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-510/KO.0301/2017 tanggal 13 Desember 2017 dan telah diangkat kembali berdasarkan RUPS LB Tanggal 06 Agustus 2018 dan dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1446/XI/SU/2018 serta ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-869/KO.031/2018 Tanggal 13 November 2018 untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.
- **Suwarto, SE** sebagai Direktur Pemasaran diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 06 Agustus 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1446/XI/SU/2018 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-869/KO.031/2018 Tanggal 13 November 2018 untuk masa

jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.

ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas

Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik dan secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas. Rekomendasi Dewan Pengawas tertuang dalam Notulen rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi. Beberapa hal penting dari Rekomendasi Dewan Pengawas yang telah dilaksanakan oleh Direksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rapat Tanggal 05 Januari 2018, telah menerapkan target secara individu ke masing masing pegawai .
- Rapat tanggal 05 Pebruari 2018, proses pengadaan pegawai kontrak PD BPR BKK WONOGIRI Tahun 2018 , serta pelaksanaan tes kompetensi calon pejabat bekerjasama dengan lembaga Psikologi Terapan Semarang.
- Rapat tanggal 07 Maret 2018, selalu berupaya memenuhi kewajiban ketentuan dengan melakukan perubahan Struktur organisasi dengan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya.
- Rapat tanggal 10 April 2018:
 - a. Dewan Pengawas menyetujui penempatan pegawai dalam jabatan struktural karena sudah melalui uji kompetensi.
 - b. Dewan Pengawas menyetujui melakukan evaluasi kinerja Sdr Satino, SE karena sudah terlalu lama mengorbankan cabang yang ditempati yang tidak dapat tumbuh secara maksimal sebagaimana cabang lain.
- Rapat tanggal 08 Mei 2018, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 maka Pembagian laba tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan amanat RUPS namun ada kebijakan dari pengurus untuk pegawai.
- Rapat tanggal 11 Juli 2018, Melakukan pengangkatan Saudara Satiman Satpam KC Giriwoyo yang memasuki usia pensiun pada tanggal 01 Agustus 2018 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2018

sebagai pegawai bulanan, serta pengangkatan pejabat dan Mutasi Pejabat .

- Rapat tanggal 08 Agustus 2018, menyetujui permohonan pensiun dini saudari Lies Sumartiyani karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat pensiun.
- Rapat tanggal 28 September 2018, adanya pejabat yang mengundurkan diri itu merupakan hak pegawai, untuk dipastikan semua kewajiban sudah diselesaikan pada saat pemutusan hubungan kerja. Untuk lebih memotivasi kinerja pejabat yang baru, pelaksanaan pelantikan dibuat lebih dari sebelumnya agar merasa lebih dihargai serta ada pembinaan dari Bupati atau Sekda pada saat pelantikan.
- Rapat tanggal 28 Oktober 2018, dalam melakukan penyusunan RBB Tahun 2019 berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Target kenaikan rata rata 10%. Reward dan Punishment di terbitkan dengan Surat Keputusan Direksi agar terdapat keseimbangan dan dapat mencapai target kinerja berdasarkan RBB.
- Rapat tanggal 14 Nopember 2018 telah menyusun RBB Tahun 2019 dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- Rapat Tanggal 11 Desember 2018 melakukan sistem pengkelasan cabang dengan melakukan sharing kepada PD BPR BKK UNGARAN.

iii. Pelaksanaan Operasional

Direksi telah melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2018 dengan cukup baik. Secara umum target tahun 2018 dapat tercapai dimana target Asset tercapai sebesar 100,42 %, Dana Pihak Ketiga tercapai 102,19 %, Kredit Yang Diberikan tercapai 99.95 % pendapatan tercapai 94,33 %, biaya terealisasi sebesar 93,00 % dan laba tercapai sebesar 100,34 %. Disisi lain target penurunan NPL sebesar 5.82 % baru terealisasi sebesar 6,28 %. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) cukup optimal tercermin dari perkembangan kredit dari tahun 2017 sebesar Rp 36.313.582 ribu. Namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM dari sisi

spiritual untuk menghindari adanya penyalahgunaan (fraud) oleh oknum pegawai. Pengelolaan biaya cukup efisien tercermin dari rasio BOPO sebesar 79.70% dan pengelolaan Likuiditas cukup baik tercermin dari cash ratio sebesar 8,69 % dan LDR sebesar 82,02%.

iv. BMPK

Tidak terdapat pelanggaran BMPK, sebagaimana laporan bulanan BMPK yang telah dikirimkan.

v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam hal kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tercermin dari hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit 1,75 (sangatbaik). Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil yang cukup baik. Terdapat sedikit penurunan penilaian terhadap Manajemen oleh OJK akibat beberapa faktor terutama pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kredit. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan umum OJK di tahun 2018 terdapat kelemahan-kelemahan tata kerja dan pengawasan yang kemudian dijadikan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Manajemen Risiko yang mengekspose Profil Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan pentahapannya yang untuk pertama kalinya dilaporkan pada posisi laporan semester kedua tahun 2018.

vi. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik RUCHENDI MARDJITO RUSHADI & REKAN yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditunjuk sebagai pelaksana audit dengan Nomor SPK KP-01/62/VII/PKS/2018 dan 044/KAP.RMR/SP/XII/2018. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017.

Sedangkan laporan Publikasi Triwulan IV posisi laporan bulan Desember 2018 sebagai bagian dari transparansi kondisi keuangan

telah dimuat di Surat Kabar Harian Jawa Pos edisi Kamis tanggal 20 Maret 2019 di halaman Radar Wonogiri serta telah dipasang di papan pengumuman seluruh kantor baik kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan Kantor Kas PD BPR BKK WONOGIRI.

Di dalam operasionalnya, PD BPR BKK WONOGIRI tidak terlepas dari masalah hukum. Selama tahun 2018 tidak ada kasus pengaduan nasabah, namun terdapat 1 (satu) gugatan pengadilan pada tanggal 07 Juni 2018 dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2018/PN Wng oleh debitur Kantor Pusat Operasional No Rekening 01.01.01.002747 yang telah didokumentasikan Direksi berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Nomor KP-01/011/III/P.Ks/2018 dan Nomor 018/MoU-Bnd/III/2018 dengan menunjuk Clemens Aji Dwi Wijaya, SH. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 telah melalui sidang ke 11 dengan agenda penyampaian duplik.

Sedangkan kasus gugatan pengadilan yang didokumentasikan oleh Direksi pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus yang belum selesai. Dari kedua kasus tersebut PD BPR BKK WONOGIRI diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk dari kantor Advokat CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH and PARTNERS. Kedua kasus tersebut yaitu:

- 1) kasus gugatan yang dilakukan oleh nasabah kredit rekening nomor 09.01.01.001631 dari Kantor Cabang Baturetno yang dilayangkan ke Mahkamah Agung, saat ini masih dalam proses penyelesaian dan telah memasuki tahap banding kasasi ke 2 (dua).
- 2) kasus gugatan yang dilakukan oleh nasabah kredit dengan rekening nomor 07.01.01.002704 dari Kantor Cabang Purwantoro yang dilayangkan ke Mahkamah Agung banding kasasi, saat ini masih dalam proses penyelesaian.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI yaitu:

- 1. Agus Prasutio, SH. MSi** sebagai Ketua Dewan Pengawas, lulus fit and proper test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep : 30/KO.032/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan RUPS - LB tanggal 25 Juli 2016, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-

01/979/VII/SU/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-430/KO.032/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

2. **Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si** sebagai Anggota Dewan Pengawas, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-71/KO.0301/2018 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 03 September 2018. Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan RUPS-LB tanggal 18 Oktober 2018 untuk masa jabatan 18 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2022, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/1369/X/SU/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-0869/KO.0301/2018 Tanggal 13 November 2018.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaksanaan tugas pengawasan secara aktif yaitu dengan melakukan rapat pengurus yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi yang hasilnya tertuang dalam Notulen Rapat. Sedangkan pengawasan secara pasif yaitu memantau perkembangan PD BPR BKK WONOGIRI melalui sarana komunikasi dan media sosial yang ada.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite

Tahun 2018 PD BPR BKK WONOGIRI belum membentuk komite – komite kerja. Hal ini karena modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Sedangkan Struktur Organisasi PD BPR BKK WONOGIRI mengalami perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 25/IV/Kep.Dir/2018 dan mulai diberlakukan pada tanggal 02 April 2018. Perubahan Struktur Organisasi ini adalah dalam rangka untuk memenuhi ketentuan regulasi dan kebutuhan perusahaan.

2. Kepemilikan Saham Direksi

PD BPR BKK WONOGIRI merupakan Perusahaan Daerah dimana kepemilikan saham sepenuhnya adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dan Pemerintah Kabupaten

Wonogiri. Dengan demikian tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham di PD BPR BKK WONOGIRI. Demikian pula semua anggota Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lainnya.

Adapun komposisi kepemilikan saham PD BPR BKK WONOGIRI sebagaimana tabel berikut ini :

1 = Rp 1.000

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Pemprov Jateng	15.060.000	50,60%
2. Pemkab Wonogiri	14.700.000	49,40%
TOTAL	29.760.000	100 %

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Direksi :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	SUCIPTO, SE	DIRUT	ATMOREJONO	PONIYEM	Ds.KETRO RT.001 RW.004, Ds GUWOTIRTO KEC. GIRIWOYO, KAB. WONOGIRI
2	SUWARTO, SE	DIRPEM	SUKATMO	KARTI	CINDEREJO RT 002 RW 002 JATISARI JATISRONO
3	SARTI, SE.MM	DIRUM & KEPATUHAN	KARDI PARTOSUWITO	MANIYEM	JATIBEDUG, RT 005 RW 007, PURWOREJO WONOGIRI

4. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Sebagaimana anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas juga tidak ada yang memiliki saham di PD BPR BKK WONOGIRI, BPR lain maupun

Perusahaan lainnya. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

5. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau Pemegang Saham

Semua anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau Pemegang Saham.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Dewan Pengawas :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	AGUS PRASUTIO, SH. MSi	Ketua Dewan Pengawas	R. Tikno Hartono	Koendari	Graha Wahid Paris Blok B/3B Sambiroto RT 002 RW 010 Tembalang Semarang
2	Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si	Anggota Dewan Pengawas	Hadi Sutarmo (Alm)	Endang Kuparmi	Pencil RT 003 RW 003 Wuryorejo Wonogiri

6. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

Sebagai Perusahaan Daerah, ketetapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta mengacu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2013.

Berikut ini adalah daftar remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas selama tahun 2018:

- Berupa Uang Tunai

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Pengawas	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE.MM	Agus Prasutio	Edhy Tri Hadyantho
1.Gaji/Honor	Rp 273.720.000,00	Rp 218.976.000,00	Rp 218.976.000,00	Rp 109.488.000,00	Rp 14.598.000,00

1. THR	Rp 45.620.000,00	Rp 36.496.000,00	Rp 36.496.000,00	Rp 18.248.000,00	-
2. Tamsil	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-	-
3. Tantiem	Rp 93.501.418,00	Rp 74.801.134,00	Rp 74.801.134,00	Rp 37.400.567,00	-
Jumlah penerimaan keseluruhan	Rp 416.441.418,00	Rp 333.873.134,00	Rp 333.873.134,00	Rp 165.136.567,00	Rp 14.598.000,00

- Berupa fasilitas lain

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Pengawas	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE.MM	Agus Prasutio	Edhy Tri Hadyantho
1. Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2. Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada	Tidak Ada
3. Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	BPJS	Tidak ada	Tidak Ada
4. Telp Cell	Android	Android	Android	Android	Tidak Ada

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Kebijakan mengenai sistem penggajian pegawai PD BPR BKK WONOGIRI juga mengacu pada Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2013.

Daftar gaji pegawai dan pengurus tertinggi dan terendah beserta ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 sebagaimana daftar berikut ini:

No	Uraian	Gaji tertinggi (Rp)	Gaji terendah (Rp)	Rasio
1	Dewan pengawas	Rp 9.124.000,00	Rp 7.299.000,00	56 % : 44 %
2	Direksi	Rp22.810.000,00	Rp 18.248.000,00	56 % : 44 %
3	Pegawai	Rp 9.933.200,00	Rp 1.524.000,00	87 % : 13 %
4	Direksi dan Dewas	Rp22.810.000,00	Rp 7.299.000,00	76 % : 24 %
5	Direksi dan Pegawai	Rp22.810.000,00	Rp 1.524.000,00	94 % : 6 %

8. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

a. Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2018, Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Sebagian besar rapat diselenggarakan di Ruang Direktur Utama dan dihadiri oleh semua

anggota Dewan Pengawas dan semua Anggota Direksi. Hasil rapat dituangkan dalam Notulen Rapat yang diarsipkan di Ruang Kerja Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI.

b. Jumlah Rapat yang Dihadiri secara Fisik dan atau melalui Teknologi Telekonferensi

Setiap rapat Dewan Pengawas dan Direksi dihadiri secara fisik. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan rapat melalui media Teknologi Telekonferensi.

c. Kehadiran masing-masing anggota setiap rapat

Semua rapat yang telah terselenggara selama tahun 2018 selalu dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi.

d. Topik atau Materi Rapat

Dari 11 (sebelas) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi dapat di ringkas hasil rapat sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	05 Januari 2018	Dari Pengamatan Dewan Pengawas kasus Kredit Tahun 2017 ada yang bersinggungan dengan hukum, maka tahun 2018 harus lebih cermat lagi dan menjadi perhatian terutama agunan yang dipakai, SID selalu dijadikan referensi dalam pembahasan kredit dan selalu mengkinikan semua SOP.
2	05 Februari 2018	Strategi pemasaran dana untuk lebih ditingkatkan lagi, penanganan kredit agar lebih focus sehingga jumlah DPK dapat ditekan. Peran Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko dalam melakukan evaluasai semua kebijakan agar terus ditingkatkan untuk menekan teradinya risiko. Proses pengadaan pegawai kontrak dan Pelaksanaan tes kompetensi calon pejabat yang bekerjasama dengan Lembaga Psikologi Terapan Semarang dapat segera dilaksanakan.
3	06 Maret 2018	Pelaksanaan RKAT untuk terus dipantau, rencana perubahan Struktur Organisasi dalam rangka pemenuhan peraturan OJK yang diikuti

		perubahan Peraturan tata kerja dan SOP SDM, penempatan Pejabat sesuai dengan kompetensinya.
4	06 April 2018	Untuk Penempatan pegawai pada prinsipnya disetujui karena telah melalui uji kompetensi. Evaluasi terhadap kinerja Saudara Satino, SE disetujui serta kinerja pejabat baru agar terus dievaluasi harus lebih baik dari sebelumnya, Pelantikan pejabat Struktural hari Selasa Tanggal 10 April 2018.
5	08 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Yang harus diantisipasi terhadap kinerja pegawai belum maksimal sehingga harus dimotivasi dan dengan strategi baru agar kinerja dapat lebih baik dan stabil sampai bulan Desember • Kebijakan Pembagian laba sesuai Permendagri, mau tidak mau memang harus dilakukan. • Sehubungan hal ini baru berhubung porsi pengurus lebih tinggi untuk tahun ini kita harus menentukan kebijakan , memberikan 30% hak kita untuk memberi tambahan penerimaan pegawai, agar penyesuaian ini bisa bertahap.
6	11 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan Saudara Satiman Satpam KC Giriwoyo, yang memasuki usia pensiun pada tanggal 01 Agustus 2018 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2018 sebagai pegawai bulanan. • Pengangkatan Saudara Pambudi Agung Martanto, SE dan Sdri Sri Hastuti , Amd • Menyetujui mutasi pejabat.
7	08 Agustus 2018	Menyetujui atas pengajuan pensiun Sdri Lies Sumartiyani karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat pensiun.
8	28 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui atas permohonan pengunduran diri Saudara Dwi Sutanto dari status kepegawaian di PD BPR BKK WONOGIRI • Pelantikan pejabat pengganti maksimal awal bulan November.
9	26 Oktober 2018	Dewas mengarahkan agar penyusunan RBB Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kenaikan rata rata 10% , ada reward dan punishment yang seimbang atas pelaksanaan RBB.
10	14 Nopember	Menyetujui konsep RBB 2019, terus berinovasi

	2018	untuk menghadapi pesaing.
11	11 Desember 2019	Menyetujui konsep pengkelasan cabang, namun agar sharing terlebih dahulu dengan teman BPR BKK yang sudah menerapkan pengkelasan kantor.

9. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud)

a. Jumlah Internal Fraud yang telah diselesaikan

Tahun 2018 ada 1 (satu) kasus fraud yang telah diselesaikan. Kasus fraud tersebut dilakukan oleh Staf Pemasaran Kantor Cabang Baturetno. Atas pelanggaran yang telah dilakukannya, pelaku menerima Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai pegawai berdasarkan SK Direksi Nomor 80/XI/Kep.Dir/2018 Tanggal 30 November 2018.

b. Jumlah Internal Fraud yang sedang dalam proses penyelesaian internal BPR

Pada tahun 2018 tidak ada kasus fraud yang masih dalam proses penyelesaian Internal BPR.

c. Jumlah Internal Fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya dalam tahun 2018, karena hanya terdapat 1 (satu) kasus yang sudah ditangani.

d. Jumlah Internal Fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

Tahun 2018, tidak ada kasus fraud yang ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Daftar Internal Fraud yang terjadi di PD. BPR BKK WONOGIRI tahun 2017 dan 2018 secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut ini :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 Kasus	1 Kasus	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil	2 Kasus	1 Kasus		Nihil

Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil							
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil							
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

10. Permasalahan Hukum

a. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Tahun 2018 belum ada kasus permasalahan hukum Perdata maupun Pidana yang dihadapi yang telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

b. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Terdapat 3 (tiga) kasus hukum perdata yang dihadapi PD BPR BKK WONOGIRI yaitu 1 (satu) kasus yang terjadi pada tahun 2016, 1 (satu) kasus pada tahun 2017 serta 1 (satu) kasus pada tahun 2018.

Atas ketiga kasus tersebut sampai dengan akhir tahun 2018 belum bisa terselesaikan. Ketiga kasus tersebut telah didokumentasikan sebagai berikut :

1. Gugatan oleh nasabah pemilik rekening nomor 09.01.01.001631 dari Kantor Cabang Baturetno yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri melalui Kuasa Hukumnya tanggal 20 Desember 2016, Relas Panggilan dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 29 Desember 2016 yang diputus hakim dengan mengabulkan eksepsi Tergugat (PD BPR BKK WONOGIRI) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan banding yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri melalui suratnya No: W.12-U29/1077/HK.02/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Perihal permohonan banding perkara perdata. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perkara no 385/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 28

Nopember 2017 yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 11 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut. Atas hasil putusan banding tersebut, penggugat tidak dapat menerima dan mengajukan Kasasi yang sampai dengan akhir Tahun 2018 sampai pada tahap Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kasasi dengan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Wng.jo.No. 385/Pdt/2017/PT.SMG pada tanggal 21 Maret 2018 sehingga kasus ini belum selesai.

2. Gugatan oleh nasabah pemilik rekening nomor 07.01.01.005730 dari kantor cabang Purwantoro yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri melalui kuasa hukumnya tanggal 3 Januari 2017. Relas panggilan dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 9 Januari 2017. Pada tanggal 12 Juli 2017 terdapat putusan dari Pengadilan negeri Wonogiri dengan hasil menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa penggugat dalam konvensi telah melakukan wanprestasi. Penggugat Rekonvensi (PD BPR BKK WONOGIRI) dapat melakukan Lelang dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Atas putusan tersebut penggugat mengajukan banding dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 386/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 07 November 2017 yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Juli 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Wng yang dimohonkan banding. Penggugat kembali mengajukan Kasasi atas putusan banding tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2018 kasus Kasasi ini baru sampai pada tahap Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor registrasi 2683 K/PDT/2018 tanggal 17 September 2018 sehingga kasus ini belum selesai.
3. Pada tanggal 07 Juni 2018, PD BPR BKK WONOGIRI melalui kuasa hukumnya Clemens Aji Dwi Wijaya, SH melayangkan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2018/PN Wng atas Debitur Kantor Pusat Operasional No Rekening 01.01.01.002747 yang telah didokumentasikan Direksi. Atas perkara ini telah terjadi sidang sebanyak 11 (sebelas) kali dan sampai

dengan sidang yang ke 11(sebelas) pada tgl 13 Desember 2018 baru sampai pada tahap penyampaian duplik.

Adapun permasalahan hukum yang dihadapi PD. BPR BKK WONOGIRI sebagaimana tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	3 Kasus	Nihil
Total	3 kasus	Nihil

3. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

4. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah wujud kepedulian PD BPR BKK WONOGIRI terhadap lingkungan sosial. Selama tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang bertujuan sosial yang telah dilaksanakan yaitu:

No	Kriteria Masalah Sosial yang Ditangani *)	Jenis Kegiatan CSR Kesos	Lokasi Kegiatan CSR Kesos	Mitra Kerja CSR Kesos	Target Sasaran **)	Jumlah Sasaran yang Ditangani	Nilai Dana CSR Kesos Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Kemiskinan	Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu	Kabupaten Wonogiri		Kemiskinan		Rp. 50.000.000,00
		Bantuan Anak Yatim/Piatu & Kaum Dhuafa	Kabupaten Wonogiri		Kemiskinan	240 Orang	Rp. 72.000.000,00
		Bantuan Panti Asuhan & Panti Wredha	Kabupaten Wonogiri		Kemiskinan		Rp. 6.000.000,00
		Partisipasi Bantuan Anak Yatim / Piatu	Kabupaten Wonogiri	PWRI Cab Wonogiri	Kemiskinan		Rp. 6.000.000,00
		Partisipasi	Kabupaten	BAZDA Kab.	Kemiskinan		Rp. 6.000.000,00

		BAZDA	Wonogiri	Wonogiri			
		Partisipasi BAZNAS	Kabupaten Wonogiri	BAZDA Kab. Wonogiri	Kemiskinan		Rp. 6.000.000,00
		Bantuan Kambing Korban	Kantor Cabang PD BPR BKK WONOGIRI		Kemiskinan		Rp. 5.000.000,00
		Bantuan Untuk Masjid dan Pondok Pesantren	Kabupaten Wonogiri		Kemiskinan		Rp. 17.000.000,00
2	Keterpencilan	Bantuan Air Bersih	Kabupaten Wonogiri		Keterpencilan		Rp. 30.000.000,00
		Bantuan Sumur Pompa	Kecamatan Giritontro		Keterpencilan		Rp. 30.000.000,00
3	Kecacatan	Bantuan Kaum Difable & Yayasan Penderita Cacat	Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya		Kecacatan		Rp. 21.500.000,00
Jumlah							Rp.249.500.000,00

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik oleh Pemilik maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Wonogiri, 25 April 2019

Menyetujui,

Dewan Pengawas
PD BPR BKKWONOGIRI



AGUS PRASUTIO, SH, MSi
Ketua

PD. Bank Perkreditan Rakyat
BKK WONOGIRI



SUCIPTO, SE
Direktur Utama